

Konteks Politik dan Ekonomi Dalam Administrasi Publik

Ir. Deddy S. Bratakusumah, BE, MURP, MSc, PhD

2018

Administrasi Publik dan Politik

Birokrasi dan Politik

Salah satu topik perbincangan yang selalu mengemuka pada sektor Administrasi Publik adalah pemisahan antara Birokrasi dan Politik.

Dalam wacana ini dicanangkan bahwasanya Administrasi Publik tidak boleh dipengaruhi oleh Politik, harus ada pemisahan yang tegas antara Pejabat Politik dan Birokrat Karir dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemisahan dimaksud terutama dalam kewenangan dan keterlibatan di dalam penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Publik.

(Bratakusumah, 2015)

Namun Demikian

Responsibility and responsiveness of the administrative agencies and the bureaucracies to the elected officials (the chief executives, the legislators).

It is of central importance in a government based increasingly on the exercise of *discretionary power* by the agencies of administration.

(Rosenbloom, 2005)

Birokrasi dan Demokrasi

One of the most important and persisting challenges of modern government is how to reconcile the demands of democracy with the imperatives of bureaucracy.

Bureaucracies are hierarchical institutions that can provide the capacity and expertise to accomplish complex social tasks, but they are frequently characterized, as undemocratic and even threatening to democracy.

Democracies are systems of government that are based, directly or indirectly, on the principle of popular control.

(Kartasmita, 2008)

Birokrasi vs Demokrasi

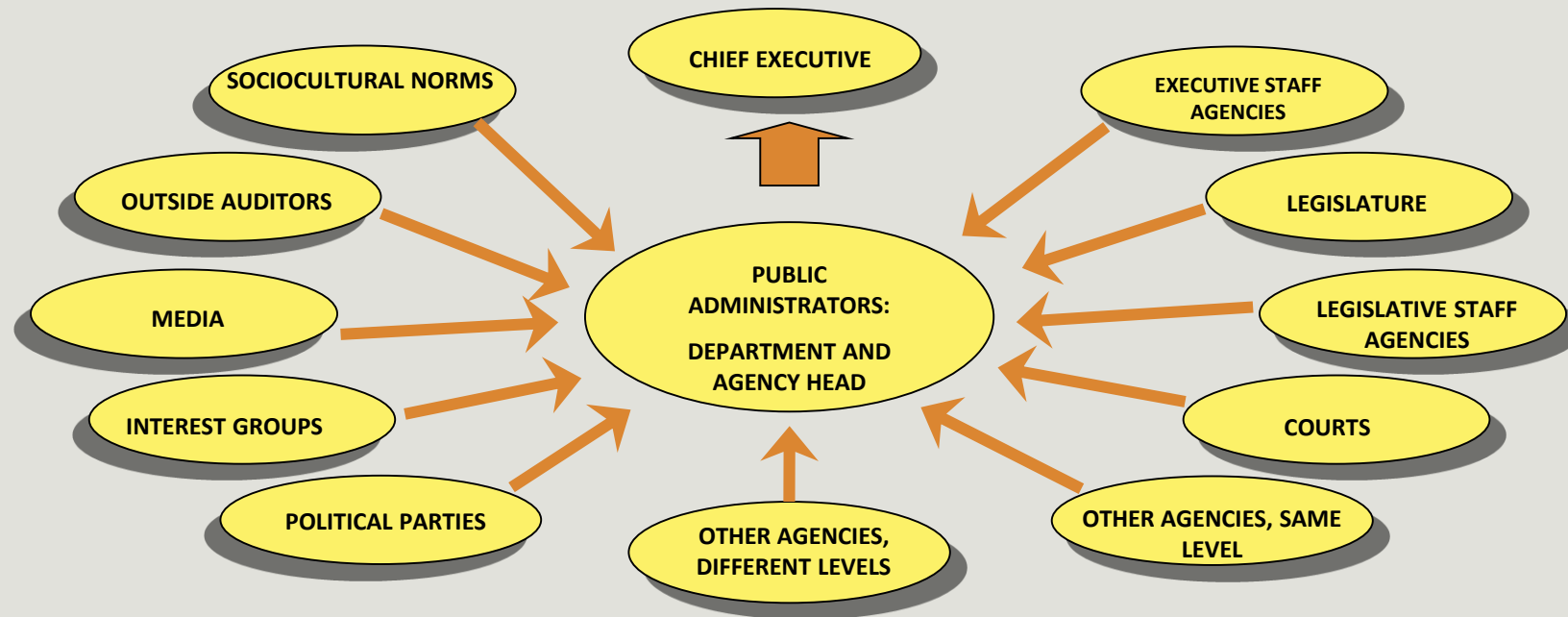


Birokrasi vs Demokrasi

“Bureaucracies are inherently antidemocratic. Bureaucrats derive their power from their position in the structure, not from their relations with the people they are supposed to serve. The people are not masters of the bureaucracy, but its clients.”

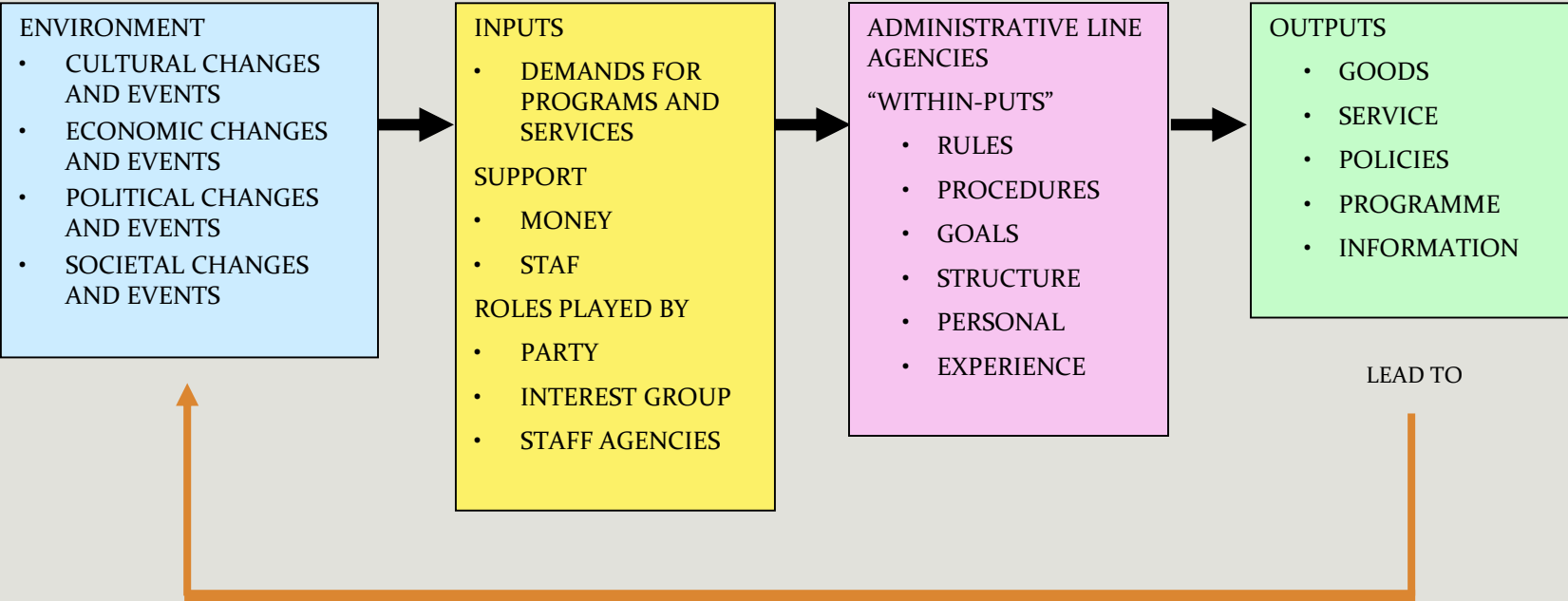
(Keyes, 2015)

Public Administration in Demokrasi



(Rosenbloom and Kravchuck, 2005)

Public Administration in a Democratic System: the Conversion Process



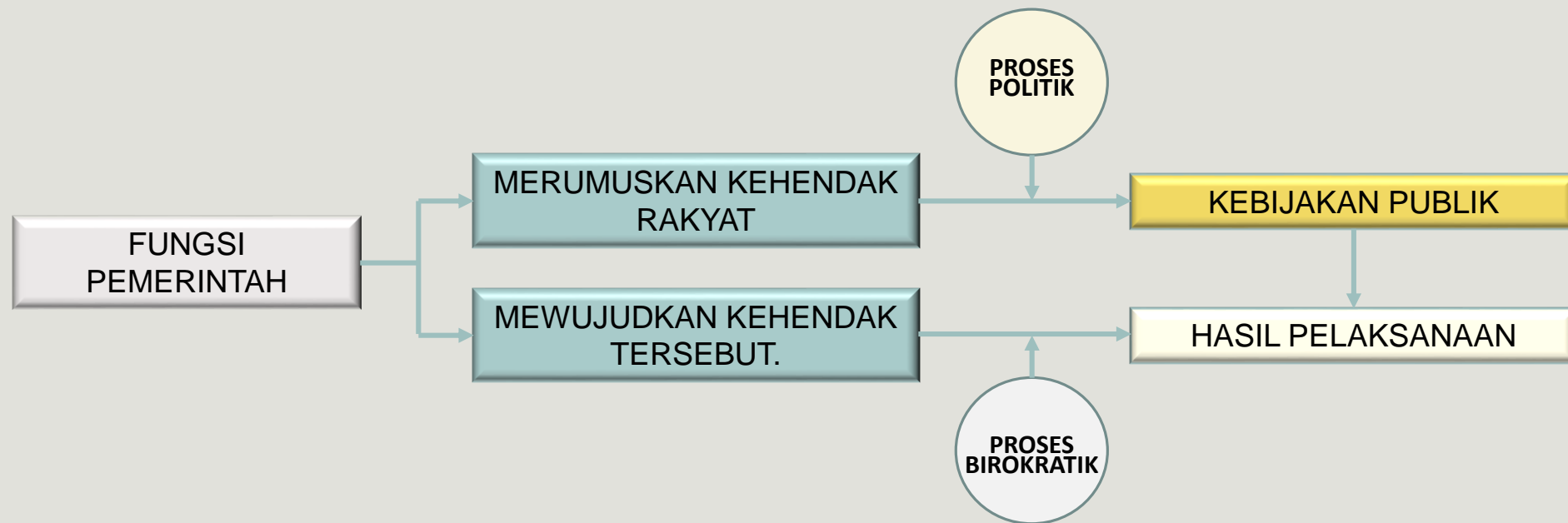
(Rosenbloom and Kravchuck, 2005)

Wacana Pemisahan Birokrasi dan Politik

Administrasi adalah salah satu elemen dari Bisnis. Sehingga Administrasi harus dipisahkan dari Politik yang sangat berkepentingan sesaat. Meskipun pada dasarnya Politiklah yang menentukan Tugas Administrasi.

(Wilson, 1887)

Dua Fungsi Pemerintah

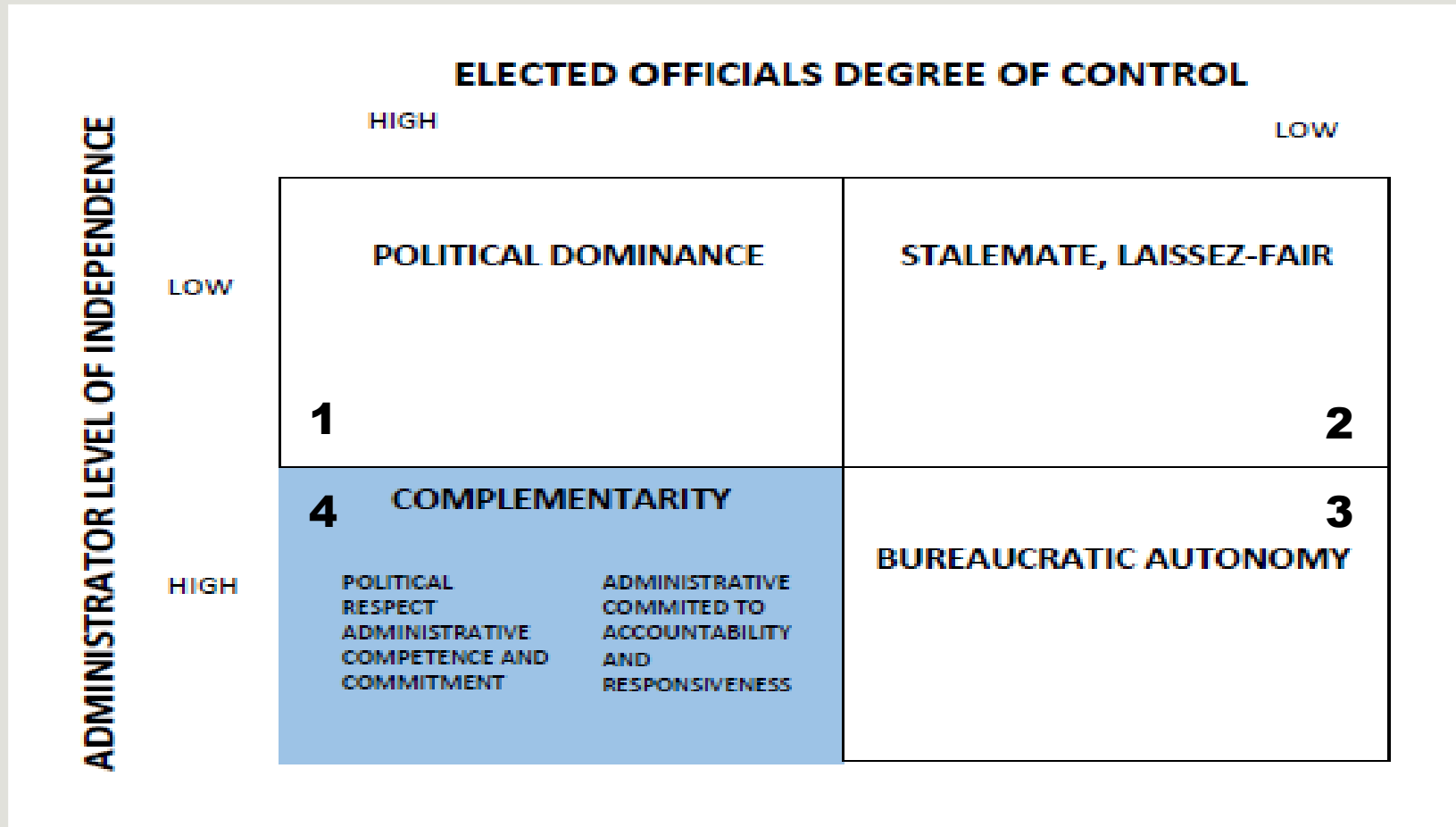


Birokrasi dan Politik Sulit Dipisahkan

“Everything having to do with the Government and everything the Government does is Political,.....”

(Appleby 1949)

Kuadran Interaksi Pejabat Politik dan Birokrat



(Svara 2001)

Kuadran 1: Dominasi Politik (Political Dominance)

Kondisi ini menggambarkan kontrol yang sangat kuat dari para pejabat politik terhadap independensi para administrator yang sangat lemah.

Kuadran 2: Kebuntuan (Stalemate, Laissez-fair)

Kondisi ini menunjukkan keadaan dimana kontrol para pejabat politik lemah, independensi para administrator pun lemah.

Kuadran 3: Birokrasi Otonom (Autonomy Bureaucratic)

Kondisi ini menggambarkan independensi administrator sangat kuat sementara dominasi para pejabat politik sangat lemah.

Kuadran 4: Komplementer (Complementarity)

Kondisi yang sangat ideal dimana kontrol dari para pejabat politik sangat kuat dan independensi dari para administrator pun sangat kuat.

Kondisi Komplementer

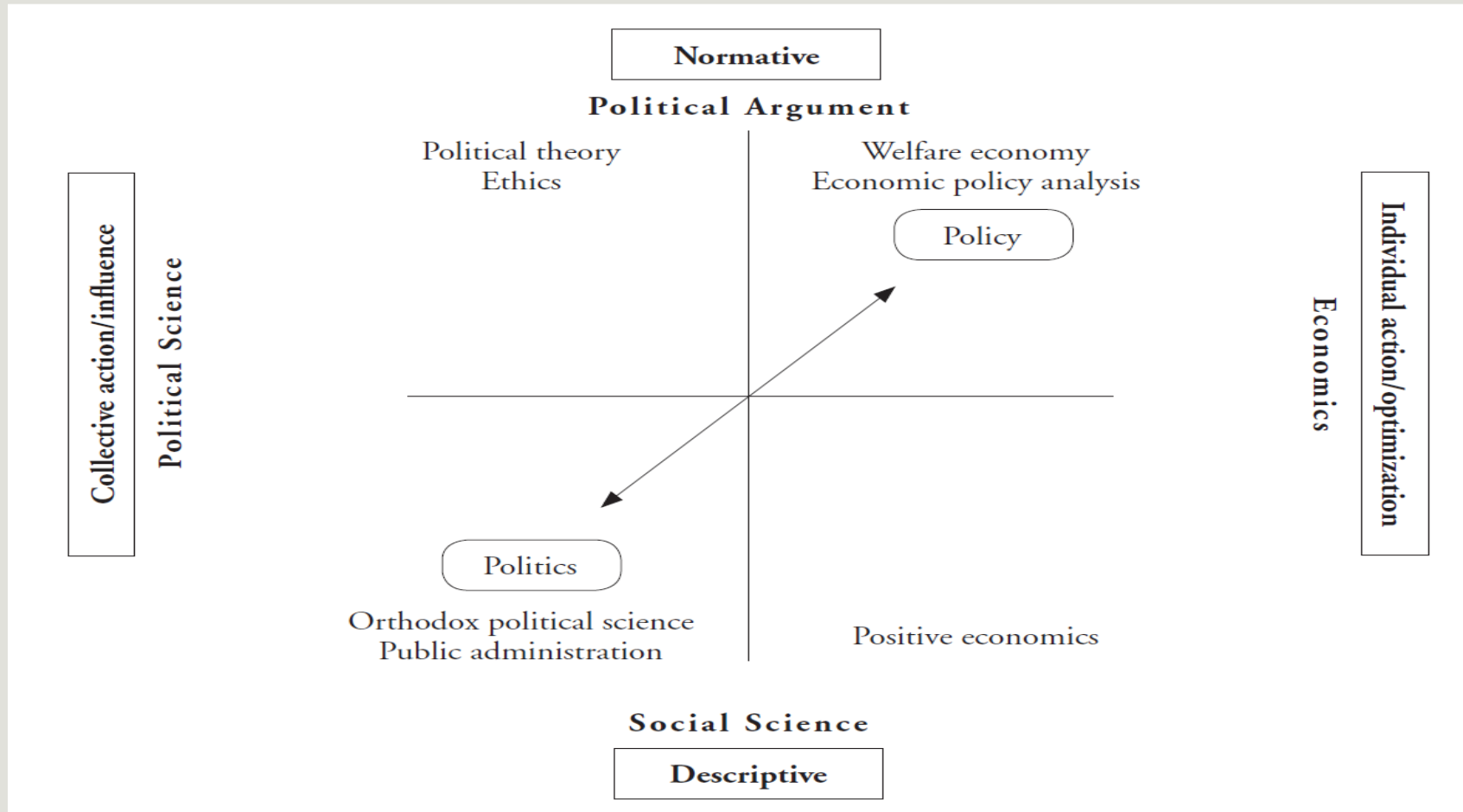
1. Administrasi yang kompeten dan memiliki komitmen, serta menghormati keputusan politik,
2. Administrator yang memiliki komitmen terhadap akuntabilitas dan ketanggapan.

Fungsi Aparatur Sipil Negara

1. Pelaksana Kebijakan Publik
2. Pelayan Publik
3. Perekat dan Pemersatu Bangsa

(Pasal 10, UU No 5/2014 ASN)

Dimensi Kebijakan dan Politik



(Mead 2010)

Dengan Demikian

Netralitas Politik Birokrat dalam Sistem Demokrasi, (misalnya melaksanakan hak pilih pada pemilihan umum atau larangan menjadi anggota partai politik,) tidak terkait dengan interaksi antara Pejabat Politik dengan Birokrat.

(Bratakusumah, 2015)

Administrasi Publik dan Ekonomi

Pemikiran Awal Administrasi Publik dan Ekonomi

Public Administration **is not** Economics

1. Public Administration is Prescriptive
2. Public Administration Is Realistic,
Empirically Grounded, and Practical
3. Public Administrators are Preoccupied with
Technical Efficiency

(Thompson 2008)

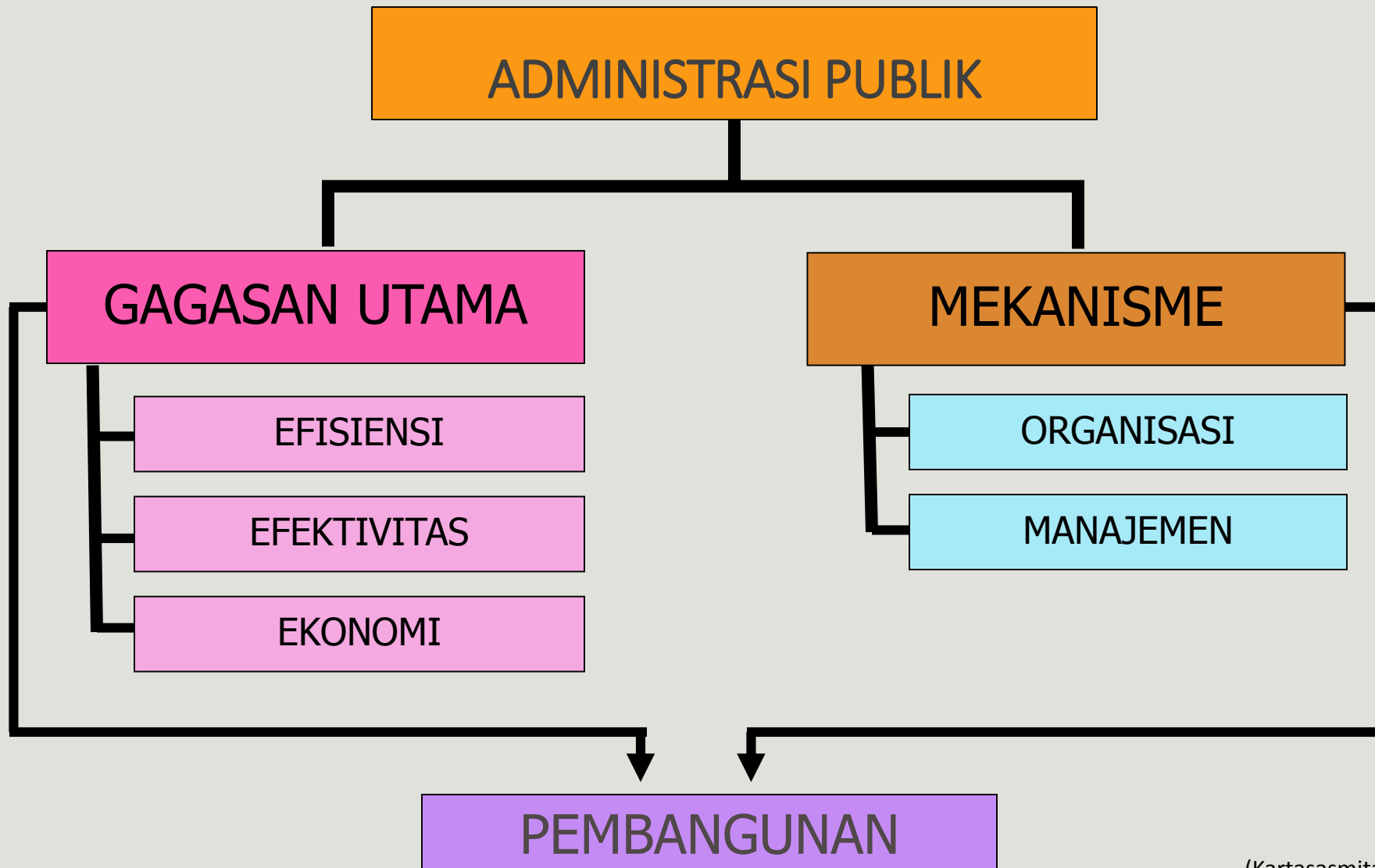
Administrasi Publik dan Ekonomi

1. Pelaksana Kebijakan Publik Terkait Ekonomi
2. Administrasi Pembangunan

Tujuan Administrasi Pembangunan

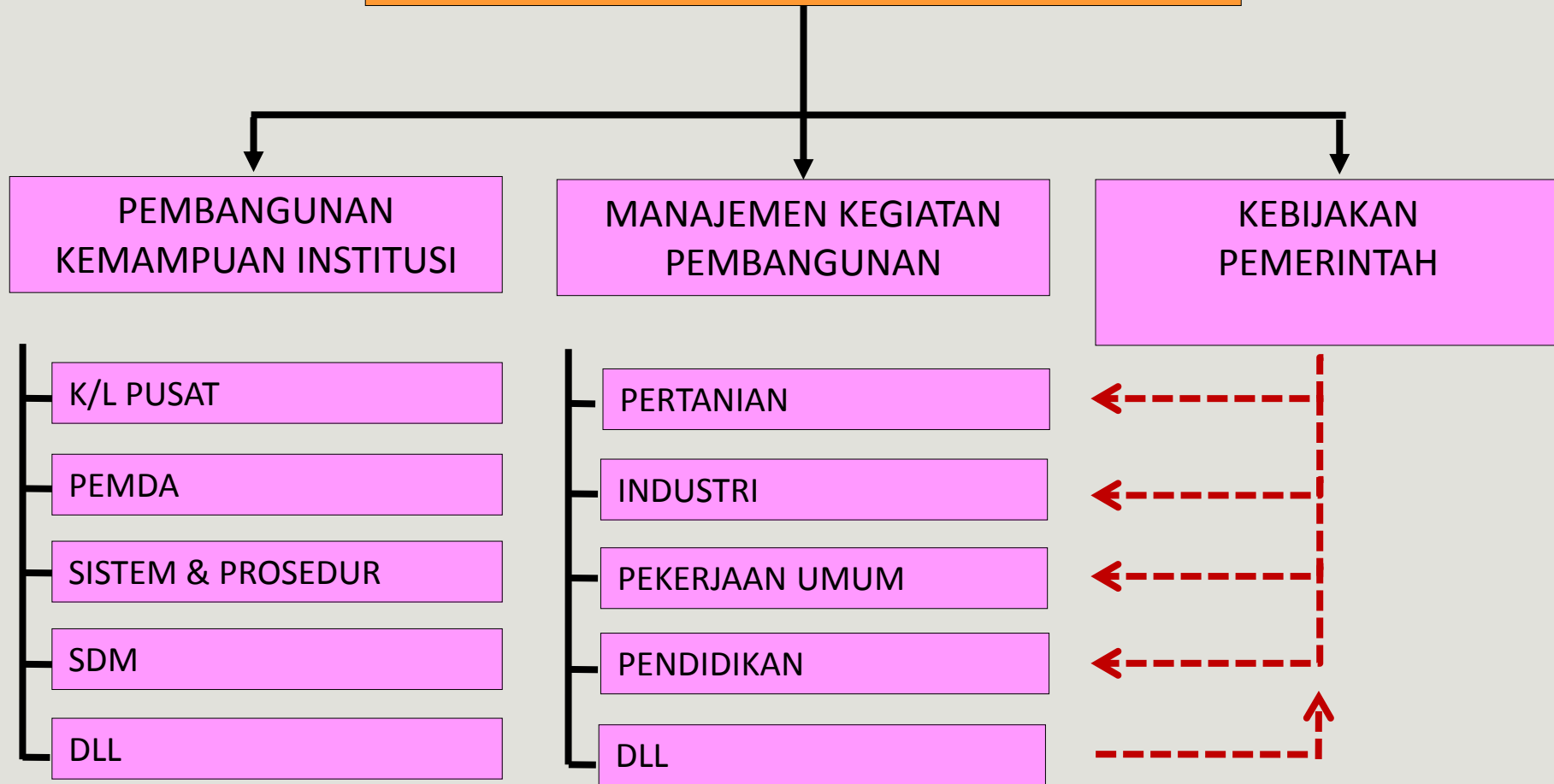
Fokus dari administrasi pembangunan adalah
“Bagaimana gagasan-gagasan dasar dan mekanisme
Administrasi Publik dapat digunakan sebagai instrumen
Pembangunan Sosial dan Ekonomi Masyarakat? “

(Kartasmita 2015)



(Kartasmita 2015)

PERSPEKTIF MANAJEMEN DALAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



(Kartasmita 2015)

Terima Kasih
